

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian yang dilontarkan, terkait dengan bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi politik publik dalam proses pereumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok tahun 2021-2026, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perumusan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026, bentuk partisipasi yang digunakan adalah *Public Meeting* berdasarkan model bentuk partisipasi yang diajukan oleh Thomas. Hal ini terlihat dari tidak adanya saluran komunikasi lain yang disiapkan oleh pemerintah daerah selain kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 dan Musrenbang RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026. Konsultasi publik dan Musrenbang ini merupakan pertemuan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau tim perumus RPJMD untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat.
2. Dalam perumusan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026, dengan menggunakan kerangka analisis *Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein, maka tingkat partisipasi berada pada tingkatan *Consultation* atau termasuk derajat tanda adanya partisipasi semu (*degree of tokenism*). Hal ini terlihat dari wadah komunikasi yang terbatas, dimana satu-satunya saluran komunikasi antara publik dan perumus kebijakan RPJMD adalah melalui konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD. Meskipun terdapat dialog dua arah dalam konsultasi tersebut, tidak ada jaminan bahwa suara publik akan diakomodasi dalam kebijakan akhir.
3. Proses pengumpulan masukan untuk RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026 melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang yang dilaksanakan secara virtual akibat pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa keterbatasan signifikan. Pertama, keterbatasan teknologi dan akses internet di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama. Tidak semua warga memiliki akses

yang memadai terhadap internet atau perangkat teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam forum virtual. Hal ini menyebabkan banyak aspirasi dan pandangan yang seharusnya bisa disampaikan oleh masyarakat menjadi tidak terakomodasi. Kedua, komunikasi virtual cenderung kurang interaktif dan tidak seefektif tatap muka dalam menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Forum *online* membatasi diskusi mendalam dan spontanitas interaksi yang seringkali menjadi kunci dalam memahami isu-isu lokal. Gangguan teknis seperti koneksi yang tidak stabil atau masalah audio-visual juga dapat menghambat proses komunikasi. Oleh karena itu, meskipun forum konsultasi publik dan Musrenbang secara virtual merupakan upaya yang patut diapresiasi di tengah keterbatasan pandemi, pendekatan ini tidak mampu menggantikan efektivitas interaksi tatap muka dalam menjaring aspirasi publik secara menyeluruh dan mendalam. Akibatnya, RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026 tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

